



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SA'IDATUL UMAH
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 632846

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 498.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 891 m²/60 m² di KAB / KOTA KEDIRI, WARISAN Rp. 99.000.000
2. Tanah Seluas 2720 m² di KAB / KOTA KEDIRI, WARISAN Rp. 142.000.000
3. Tanah Seluas 1522 m² di KAB / KOTA KEDIRI, WARISAN Rp. 90.000.000
4. Tanah Seluas 420 m² di KAB / KOTA KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 57.000.000
5. Tanah Seluas 2102 m² di KAB / KOTA KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 36.500.000

1. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 22.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.500.000**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 4.967.312**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 544.967.312



III. HUTANG

Rp.

86.632.164

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

458.335.148

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANIK EKOWATI
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 637272

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 373.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1.41 m²/1.41 m² di KAB / KOTA KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 257.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 361 m²/361 m² di KAB / KOTA KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 116.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 87.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU B100RS-GMDFJ(4X2)M/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 72.000.000
2. MOTOR, HONDA NF11BIDM/ Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 95.397.140**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

Sub Total Rp. 555.397.140

III. HUTANG Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 555.397.140

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUKARI**
2. Jabatan : **ANGGOTA**
3. NHK : **632845**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **652.771.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 478 m2/359 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 652.771.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **146.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG Tahun 1988, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA FIT Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU XENIA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 118.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **33.000.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **5.622.032**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **837.393.032**

III. HUTANG Rp. **145.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **692.393.032**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. SAIFUDDIN ZUHRI
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 632841

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 61.200.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m²/170 m² di KAB / KOTA KEDIRI, WARISAN Rp. 61.200.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 142.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 132.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 14.938.369

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 218.138.369

III. HUTANG Rp. 149.715.328

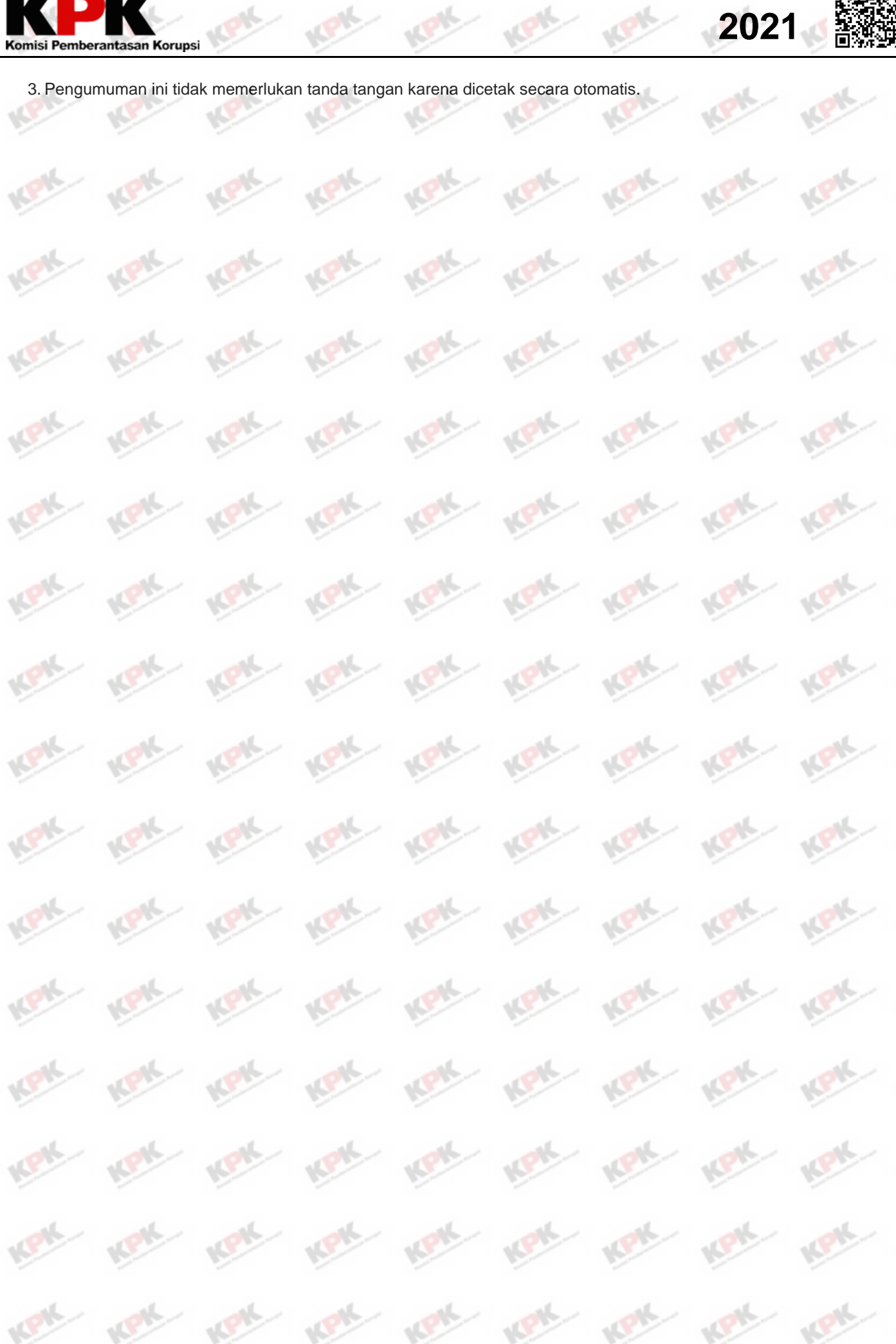
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 68.423.041

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ALI MASHUDI
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 632838

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 298.476.000

1. Tanah Seluas 4092 m2 di KAB / KOTA NGAWI, HIBAH TANPA AKTA Rp. 180.312.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 389 m2/72 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, HIBAH TANPA AKTA Rp. 84.404.000
3. Tanah Seluas 660 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, HIBAH TANPA AKTA Rp. 33.760.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 167.000.000

1. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, SUZUKI MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
4. MOBIL, TOYOTA MPV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 21.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 14.568.308**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 501.044.308**III. HUTANG** Rp. 99.711.188**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 401.333.120



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **JARWI**
2. Jabatan : **KEPALA SEKRETARIAT**
3. NHK : **632830**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **95.968.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 344 m²/70 m² di KAB / KOTA KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 95.968.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **7.500.000**

1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.250.000
2. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.250.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **12.423.800**

D. SURAT BERHARGA Rp. **---**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **16.170.641**

F. HARTA LAINNYA Rp. **---**

Sub Total Rp. **132.062.441**

III. HUTANG Rp. **83.139.200**

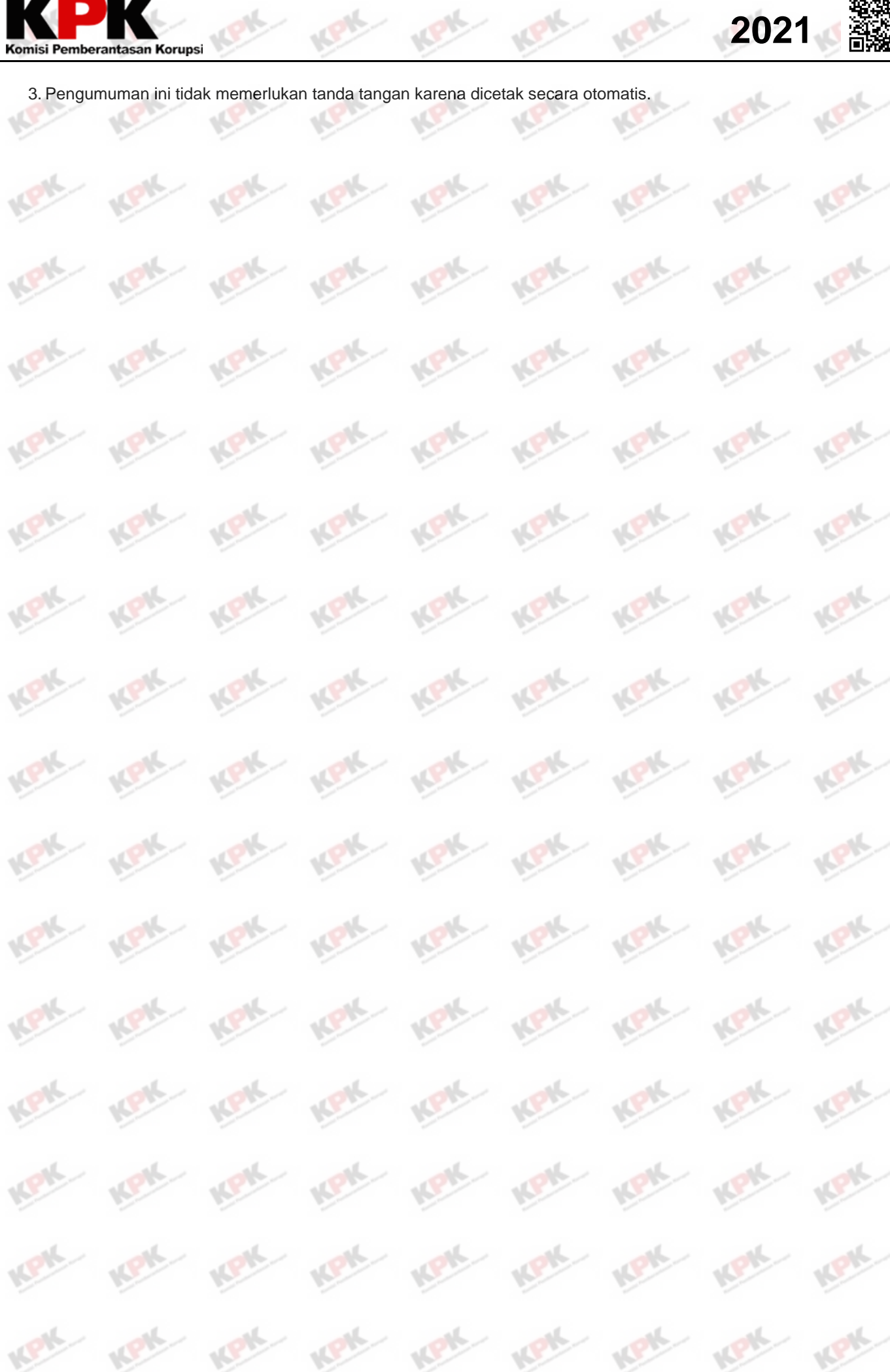
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **48.923.241**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HADI KUSWANTO
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 434004

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 970.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1070 m²/150 m² di KAB / KOTA KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 970.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 96.400.000

1. MOBIL, HONDA STREAM Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, SUZUKI SKYDRIVE Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.400.000
4. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.700.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 66.000.001

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.134.100.001

III. HUTANG Rp. 110.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.024.100.001

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.